

EVALUASI PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DI PROVINSI JAWA TENGAH

Haryono, Ahmad Syaifudin, Sri Widiastuti

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Abstract: This study aimed to evaluate the components management of the inclusive education implementation in Central Java province. This study was designed with model of CIPP (Context, Input, Process, and Product). Subjects of the study include teachers, parents, principals, school committees, and the Department of Education and Culture. Instruments used to obtain the data in this study were varied according to the revealed variable. The research instruments used include questionnaires, observation guides, interview, and documentation. The findings of this study revealed that through an instrument system of accreditation inclusive education, the management of inclusive education component in Central Java province generally rated category C (total score = 24-43) and was not even accredited (total score = <24). Meanwhile, school accreditation of SLB in Central Java generally rated category B (total score of 44-63).

Keywords : ABK, inclusive education

PENDAHULUAN

Anak berkebutuhan khusus diciptakan Tuhan di muka bumi tidak ada istilah produk gagal. Kecacatan maupun kekurangan kognitif maupun fisik tidak akan mampu menghalangi seseorang untuk berpretasi puncak. Sejatinya mereka juga memendam potensi diri yang luar biasa besar. Namun demikian, perlakuan anak-anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan masih dimarjinalkan. Misalnya, banyak sekali orang yang memiliki kemampuan berbeda secara fisik harus tersingkir dari dunia pendidikan maupun pekerjaan (Asyhabuddin 2008:406). Hal yang sama juga diperlihatkan oleh Purwandari (2009), bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal lay-

anan pendidikan, karena mereka dipandang memiliki hambatan dalam beberapa dimensi kehidupan, sehingga dalam layanan pendidikannya harus terpisah dari anak-anak yang “normal” supaya proses pembelajaran tidak terganggu.

Kondisi semacam itu masih jauh dari harapan komitmen dalam Kovensi Jeneva berupa pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education for All* (EFA). Artinya, sama seperti anak-anak lainnya, ABK juga berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Atas dasar itulah muncul konsep model pendidikan inklusif. Melalui pendidikan inklusi, difersitas karakter dan kecakapan peserta didik diakomodir dengan cara yang bijak, yaitu dengan memberi ruang kepada semua untuk

belajar. Bahkan, dalam pendidikan inklusi, perbedaan dipandang sebagai sumber belajar, ketimbang sebagai masalah (Sutrisno 2012:32).

Di Indonesia Salah satu implementasi dari konvensi itu diwujudkan dalam bentuk Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menjadi aturan formal yang memayungi upaya pengembangan pendidikan inklusi di Indonesia. Peraturan menteri tersebut memuat dengan lengkap rambu-rambu mengenai pendidikan inklusi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Melalui Permendiknas tersebut pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah memulai rintisan 160 sekolah inklusif dengan memberikan subsidi dana operasional melalui bantuan sosial. Rentang waktu 2010-2014 menarik untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif bagi ABK di Provinsi Jawa Tengah.

METODE

Penelitian ini bersifat evaluatif dan dirancang menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Subjek penelitian ini meliputi guru, wali murid, kepala sekolah, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini bervariasi sesuai dengan variabel yang diungkap. Instrumen penelitian yang digunakan antara lain kuesioner, panduan observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah dokumen, persepsi orang, dan hasil observasi. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan langsung dari lapangan. Teknik yang digunakan di antaranya angket, pengamatan, penilaian dokumen, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan mengikuti logika pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tujuan manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan kesiswaan agar kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas pokok yang termasuk dalam manajemen kesiswaan meliputi (1) penerimaan siswa ABK dan (2) program bimbingan dan penyuluhan ABK.

Seluruh sekolah inklusi di Provinsi Jawa Tengah (519 sekolah) dalam proses penerimaan siswa baru ABK tidak ada yang memberikan batasan/kuota bagi ABK. Namun, pada saat melakukan proses identifikasi dan asesmen untuk penerimaan siswa sekolah inklusif di Jawa Tengah dijalankan dengan proses yang berbeda-beda. Sekolah inklusif yang berasal dari sekolah berstatus negeri dan memiliki reputasi prestasi yang baik (terakreditasi A) memiliki kesamaan dengan sekolah sekolah luar biasa (SLB) yang terbiasa mendidik ABK. Akan tetapi, pada sekolah inklusif dari sekolah berstatus swasta, proses penerimaan siswa baru bagi ABK belum bisa menyamai seperti yang dilakukan oleh SLB. Ketidaksamaanya terletak pada ketersediaan alat dan proses identifikasi dan asesmen ABK terkait kondisi kecatatan fisik, psikis, dan IQ serta bakat dan minat.

Sekolah yang tidak memiliki data pribadi ABK berdampak pada proses pembelajaran dan/atau pengembangan bakat dan minat ABK. Selain itu, pihak sekolah tidak bisa melakukan promosi atas prestasi atau karya-karya ABK. Dengan demikian, ketersediaan data pribadi ABK yang memadai pada setiap ABK mengawal kebijakan-kebijakan sekolah pro pada ABK.

Kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik

siswa ABK. Model pengembangan kurikulum tersebut dinamakan dengan jenis model modifikasi (Kemdiknas 2010:75-77). Komponen kurikulum berupa aspek pembelajaran yang dimodifikasi terletak pada empat komponen utama pembelajaran yaitu silabus, RPP, dan sistem evaluasi. Modifikasi kurikulum pada aspek pembelajaran ini dilaksanakan pada sekolah inklusi pada sekolah berstatus negeri dan bereputasi baik, sedangkan pada sekolah inklusi pada sekolah berstatus swasta, modifikasi kurikulum pada aspek pembelajaran tidak dilakukan.

Untuk menunjang program pembelajaran individu (PPI) bagi ABK, sekolah inklusi dari sekolah berstatus negeri maupun SLB menyediakan program pembelajaran individu dengan melibatkan para guru BK dan/atau mata pelajaran. Pengembangan program pendidikan individu tersebut didasarkan pada data pribadi ABK yang dimiliki pihak sekolah saat penerimaan siswa ABK. Ini berarti, sekolah inklusi yang tidak memiliki data pribadi ABK tidak membuat PPI. Tanpa PPI, program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan bakat dan minat pada ABK tetapi kecenderungannya program pengembangan siswa lebih banyak dipe-runtukkan pada siswa reguler (normal).

Di sisi lain, sekolah negeri yang menjalankan pendidikan inklusif tidak mampu menyediakan laporan belajar khusus bagi ABK. Hal inilah yang berbeda SLB dengan sekolah inklusif di luar SLB dalam melaporkan perkembangan belajar siswa ABK. Laporan belajar ABK disamakan dengan siswa normal.

Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah inklusi sebagian besar sama dengan sekolah reguler meliputi guru, tenaga kependidikan, pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Lebih khusus, tenaga kependidikan yang

dimiliki sekolah inklusi adalah guru kelas, guru mata pelajaran (pendidikan agama serta pendidikan jasmani dan kesehatan), dan guru pembimbing khusus.

Dari 519 sekolah yang menyatakan sebagai sekolah inklusi, guru-guru masih membutuhkan tambahan pembekalan/pelatihan pendidikan inklusif. Hal ini disebabkan ketidakpahaman guru dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Program pendidikan inklusif masih hanya di atas kertas (peraturan/dokumen). Selain itu, belum banyak pelatihan pendidikan inklusi dilaksanakan oleh kementerian ataupun dinas pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jika ada, guru yang dilibatkan mengikuti program tersebut masih terbatas jumlahnya.

Manajemen sarana-prasarana sekolah inklusi bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan serta penggunaan sarana dan prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar (KBM), baik untuk anak normal maupun ABK.

Dari angket dan wawancara yang dilakukan di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi diperoleh informasi bahwa penggunaan sarana-prasarana antara ABK dan anak normal tidak dibeda-bedakan. Selain itu, sarana-prasarana khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak tidak disediakan dan bahkan sarana dan prasarana dalam bentuk media pembelajaran pun juga tidak ditemukan. Jadi, sarana dan prasarana bagi siswa ABK masih terabaikan.

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah inklusi di Jawa Tengah belum memasukkan implementasi program

pendidikan inklusi dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Biaya yang diperoleh untuk implementasi pendidikan inklusi diperoleh dari dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Dana yang diperoleh umumnya digunakan untuk memberikan beasiswa bagi ABK maupun biaya tambahan bagi guru mata pelajaran yang merangkap menjadi guru pembimbing khusus bagi ABK.

Sebagai suatu sistem sosial, sekolah merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Kemajuan sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, makin maju pula sumber daya manusia pada daerah tersebut. Sebaliknya, makin rendah tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, akan semakin mundur pula sumber daya manusia pada daerah tersebut. Karena itu, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan pendidikan di daerah. Kepala sekolah dan guru bukan hanya memikirkan kemajuan sekolah tetapi masyarakat setempat terlibat pula memikirkannya.

Hubungan sekolah dan masyarakat pada pelaksanaan pendidikan inklusif tampak ada jurang pemisah. Banyak sekolah masih kurang melibatkan masyarakat dalam implementasi pendidikan inklusif secara penuh. Pelibatan hanya sekadar formalitas untuk koordinasi dalam perencanaan maupun sosialisasi. Akan tetapi, pada tahap pelaksanaan maupun evaluasi seringkali tidak dilibatkan. Bahkan, ada masyarakat di sekitar sekolah inklusif tidak mengetahui jika sekolah yang bersangkutan melaksanakan sekolah inklusif.

Di sisi lain, layanan khusus yang diberikan sekolah kepada siswa ABK belum optimal. Alasan klasik yang diungkapkan adalah

persoalan pembiayaan layanan khusus. Dana yang minim dan terbatas membuat layanan khusus dijalankan secara formal sekadarnya. Dampaknya program pembelajaran individu, bakat dan minat para ABK tidak ditangani secara optimal dan terkesan hanya sekadar menerima ABK tanpa diberikan sejumlah perlakuan-perlakuan yang berbeda dengan siswa normal lainnya.

Pembahasan

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar setiap manusia yang akan berlangsung sepanjang hidup sehingga manusia lebih bermartabat. Melalui pendidikan, manusia dapat menjadi makhluk terbaik bagi dirinya dan bermakna bagi makhluk lainnya saat dirinya menampilkan sebagai kholifah di muka bumi (Aedy 2009:70). Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (*difabel*).

Kondisi berbeda ditemukan dari hasil survei Badan Koordinasi (Bakor) Pendidikan Luar Biasa Jawa Tengah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dari 33.472 ABK diperoleh informasi bahwa masih terdapat 26.568 (79,37%) ABK di Jawa Tengah belum sekolah, sedangkan 6.904 (20,62%) ABK yang sudah sekolah (Subagya 2009).

Meski jumlah ABK di Jawa Tengah relatif kecil, keinginan ABK memperoleh pendidikan yang layak masih belum dirasakan. Subagya (2012:20) mengutarakan bahwa ketidakperkenanan para ABK bersekolah didasarkan pada alasan, yakni (1) tempat tinggalnya jauh dari sekolah khusus, (2) yang bersangkutan ditolak bersekolah pada sekolah terdekat, dan (3) motivasi orang tua ABK sangat rendah/malu/menyembunyikan. Sementara itu, data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah dinyatakan bahwa ada 5 kabupaten dari 35 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB Negeri, yakni (1) Kabupaten Demak, (2) Kabupaten Klaten, (3) Kabupaten Magelang, (4) Kabupaten Wonosobo, (5) Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, pendidikan inklusi tanpa melalui SLB menjadi diperlukan untuk memuluskan jalan para ABK memperoleh pendidikan yang layak. Salah satunya direalisasikan dengan mengikutsertakan ABK ke dalam sekolah reguler. Meskipun demikian, tidak semua sekolah reguler bersedia mengusung pendidikan inklusif untuk menampung seluruh ABK di Provinsi Jawa Tengah.

Sekolah di Jawa Tengah yang memberanikan diri menjadi sekolah inklusif baru ada 519 sekolah, yakni 472 sekolah berstatus negeri dan sekolah berstatus swasta berjumlah 47 sekolah. Sementara itu, sebaran jenis ketunaan yang diterima dalam sekolah inklusi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Meski jumlah sekolah dan jenis ketunaan/kecacatan ABK yang tersebar di Jawa Tengah tertampung di sekolah, pelaksanaan pendidikan inklusif masih belum optimal. Ketidakoptimalan ini terlihat dari evaluasi pengelolaan/manajemen komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan di tabel 2.

Evaluasi pada tabel tersebut jika disejajarkan dengan instrumen monitoring dan evaluasi diri sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Manajemen Dikdasmen bekerja sama dengan *Managing Contractor Program Management-Australian Indonesia Basic Education Program* (MCPM-AIBEP) diketahui bahwa akreditasi kondisi sekolah inklusif di Provinsi Jawa Tengah umumnya dinilai kategori C (jumlah skor=24–43) dan bahkan tidak terakreditasi (jumlah skor=<24). Sementara itu, akreditasi sekolah SLB di Jawa Tengah umumnya dinilai kategori B (jumlah skor 44–63).

Tabel 1. Jumlah Siswa Sekolah Inklusif sesuai Jenis Ketunaan di Provinsi Jawa Tengah

No.	Klasifikasi	Jenis ketunaan	Jumlah
1.	A	Tuna Netra	75
2.	B	Tuna Rungu	97
3.	C	Tuna Grahita Ringan	913
4.	C1	Tuna Grahita Sedang	137
5.	D	Tuna Daksa Ringan	146
6.	D1	Tuna Daksa Sedang	30
7.	E	Tuna Laras	156
8.	F	Tuna Wicara	74
9.	G	Tuna Ganda	38
10.	H	Hiperaktif	547
11.	I	Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktif (ADHD /Attention Deficit Hyperactivity Disorder)	75
12.	J	Indigo	14
13.	K	Lambat Belajar	4.501
14.	Ats	Autis	101
JUMLAH TOTAL			6.904

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014

Tabel 2. Evaluasi Manajemen Komponen-Komponen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

No.	Komponen Pendidikan	Evaluasi Pengelolaan
1.	Kesiswaan	Kuota khusus penerimaan siswa baru dari ABK belum ada Proses identifikasi dan asesmen ABK tidak ada Lembar identifikasi dan asesmen ABK tidak tersedia
2.	Kurikulum	Kurikulum dikembangkan dengan model modifikasi pada tataran silabus, RPP, dan evaluasi Program pembelajaran individu (PPI) tidak disediakan Laporan penilaian proses belajar khusus ABK tidak ada
3.	Tenaga kependidikan	Guru pembimbing khusus tidak ada Pelatihan/pembekalan pendidikan inklusif masih dibutuhkan
4.	Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana untuk membantu proses belajar dan pengembangan bakat dan minat masih disamakan dengan siswa normal
5.	Pembiayaan	RAPBS belum memasukkan penyelenggaraan pendidikan inklusif Pembiayaan hanya digunakan untuk beasiswa dan biaya tambahan bagi guru mata pelajaran yang merangkap menjadi guru pembimbing khusus
6.	Lingkungan dan layanan khusus	Banyak sekolah belum melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif Layanan khusus ABK di sekolah inklusif tidak ada

Sumber: Data dari Angket Penelitian

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Subagyo (2012) mengenai kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Temuan penelitian tersebut dinyatakan bahwa kesiapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi Jawa Tengah masih pada tataran nilai E atau dapat dikatakan bahwa sekolah belum memiliki kesiapan dalam mengimplementasikan Pendidikan Inklusi. Komponen utama yang menjadi prioritas persyaratan utama adalah komponen yang berkaitan dengan pembiayaan (sebesar 15,94%) dan infrastruktur (sebesar 19,91%). Kedua komponen ini disebabkan para Kepala Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum mengeluarkan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dasar hukum yang belum jelas tersebut membuat persiapan hingga pelaksanaan pendidikan inklusif pada tahun 2014 masih jauh dari harapan khususnya dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah ditemukan ada 5 kota/kabupaten yang secara jelas memiliki peraturan daerah

mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, yakni Kabupaten Boyolali, Kota Salatiga, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan Kota Surakarta. Dengan demikian, peraturan daerah sebagai payung hukum menjadi hal utama yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, rumusan simpulan dalam penelitian ini diketahui bahwa (1) manajemen kesiswaan pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan (i) proses penerimaan siswa baru ABK tidak ada yang memberikan batasan/kuota bagi ABK, (ii) proses identifikasi dan asesmen ABK tidak dilakukan, dan (iii) lembar identifikasi dan asesmen ABK tidak tersedia di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; (2) manajemen kurikulum pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang. Hal ini disebabkan (i) kurikulum dikembangkan dengan model modifikasi pada tataran rancangan perangkat pembela-

jaran (silabus, RPP, dan sistem evaluasi), (ii) program pembelajaran individu (PPI) tidak diberikan kepada ABK, dan (iii) laporan penilaian proses belajar khusus ABK tidak disusun; (3) manajemen tenaga kependidikan pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang. Hal ini disebabkan ketidakpahaman guru dalam melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah reguler. Untuk itu, guru-guru masih membutuhkan tambahan pembekalan/pelatihan pendidikan inklusif; (4) manajemen sarana dan prasarana pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang. Hal ini disebabkan penggunaan sarana-prasarana antara ABK dan anak-anak normal tidak dibedakan. Sarana dan prasarana khusus bagi siswa ABK masih diabaikan; (5) manajemen pembiayaan pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang. Hal ini disebabkan bahwa sekolah inklusi di Jawa Tengah belum memasukkan implementasi program pendidikan inklusif dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Biaya yang diperoleh dari dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/kota umumnya digunakan untuk memberikan beasiswa bagi ABK maupun biaya tambahan bagi guru mata pelajaran yang merangkap menjadi guru pembimbing khusus bagi ABK; dan (6) manajemen lingkungan dan layanan khusus pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang. Hal ini disebabkan oleh banyak sekolah masih kurang melibatkan masyarakat dalam implementasi pendidikan inklusif secara penuh. Bahkan, ada masyarakat di sekitar sekolah inklusif tidak mengetahui jika sekolah di sekitarnya melaksanakan implementasi pendidikan inklusif. Kondisi serupa tampak pada manajemen layanan khusus bagi ABK yang dinilai kurang. Hal ini disebabkan oleh kucuran dana yang minim dan terbatas membuat layanan khusus dijalankan sekadarnya. Program pembelajaran individu, bakat dan minat para ABK tidak ditangani secara optimal dan bahkan terkesan hanya sekadar menerima ABK tanpa diberi-

kan sejumlah perlakuan-perlakuan yang berbeda dengan siswa normal lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian tersebut saran yang direkomendasikan meliputi (1) untuk meningkatkan hasil evaluasi pendidikan inklusif di Jawa Tengah, kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu menyusun peraturan daerah tentang pendidikan inklusif. Luaran peraturan daerah diasumsikan dapat menjadi payung hukum yang lebih valid dalam memenuhi komponen-komponen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif; (2) pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah reguler perlu bekerja sama dengan guru/tenaga terapis dari sekolah luar biasa (SLB); dan (3) temuan penelitian ini dapat ditindaklanjuti sebagai pijakan dalam mengembangkan model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sesuai dan cocok dengan situasi dan kondisi demografi Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, H. Hasan. 2009. *Karya Agung Sang Guru Sejati*. Bandung: Alfa Beta.
- Asyhabuddin. 2008. "Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto". *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*. Vol. 13, No. 3, Sep-Des 2008, hlm 406-519.
- Kemdiknas. 2010. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementerian Indonesia Australia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Purwandari. 2009. Pendidikan Inklusif: Masalah Ketenagaan dan Peran Serta Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Sekolah Inklusif. Makalah disampaikan

- dalam Temu Ilmiah Nasional Jurusan PLB se-Indonesia di UNY dengan tema *Manajemen Pendidikan Inklusi di Indonesia*, pada Tanggal 1–3 Agustus 2009 yang dilaksanakan di Hotel Grage, Jalan Sosrowijayan 242 Yogyakarta.
- Subagya. 2009. *Laporan Hasil Validasi Data ABK Provinsi Jawa Tengah 2008*. Bakor PLB Jateng.
- Subagya. 2012. “Analisis Kebutuhan Rintisan Implementasi Sekolah Penyelenggara pendidikan Inklusif (SPPI) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010”. *Jurnal Rehabilitasi & Remediasi*, Tahun 21, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 19 – 28.
- Sutrisno. 2012. “Signifikansi Pendidikan Inklusi dalam Mewujudkan Pendidikan untuk Semua”. *Mukaddimah*, Vol. 18, No. 1, 2012, hlm. 31 – 40.